

EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN
PENATAAN RUANG PADA KAWASAN CAGAR ALAM
GEOLOGI KARANGSAMBUNG



Tesis

Indraya Kusyuniadi
30000216410031

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DI PONEGORO
SEMARANG
2020

LEMBAR PENGESAHAN



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020

TESIS

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN
PENATAAN RUANG PADA KAWASAN CAGAR ALAM
GEOLOGI KARANGSAMBUNG**

Disusun oleh :

**Indraya Kusyuniadi
30000216410031**

Mengetahui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Rer, Nat. Ir. Imam Buchori

**Ketua Program Studi
Ilmu Lingkungan**



Dr. Eng Maryono, ST, MT

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PADA KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI KARANGSAMBUNG

Disusun oleh :

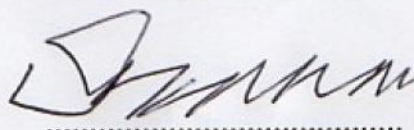
Indraya Kusyuniadi
30000216410031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 14 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Tanda Tangan

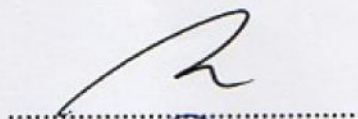
Prof. Drs. Sudharto Prawata Hadi, MES, Ph.D.



.....

Anggota

1. Prof. Dr. Rer, Nat. Ir. Imam Buchori



.....

2. Dr.rer.nat. Thomas Triadi Putranto, S.T., M.Eng.



.....

LEMBAR PERNYATAAN



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Studi Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Semarang, Februari 2020



Indraya Kusyuniadi

DAFTAR RIWAYAT HI DUP



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020

RIWAYAT HIDUP



Indraya Kusyuniadi, lahir di Gombang Kabupaten Kebumen Tanggal 17 Juni 1974. Menamatkan pendidikan formal dari SD hingga SMA di Gombang, diantaranya SDN 3 Sidayu Gombang, SMPN 1 Gombang dan SMAN 1 Gombang. Setelah lulus SMA melanjutkan ke perguruan tinggi di Kota Malang yaitu ITN (Institut Teknologi Nasional) Malang Tahun 1993 dengan mengambil jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) dan lulus pada Tahun 1998.

Setelah lulus pada jenjang pendidikan S1, penulis bekerja sebagai tenaga profesional pada konsultan teknik dan perencanaan. Penulis juga merupakan anggota dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) dari Tahun 2006 sampai dengan sekarang. Hingga pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Lingkungan (MIL) Angkatan 49 Program Pasca Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis

KATA PENGANTAR



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

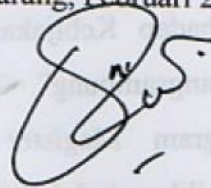
Segala Puji ke hadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga dapat diselesaikannya tesis yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Terhadap Kebijakan Penataan Ruang Pada Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung”. Tesis ini diajukan dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang. Pemilihan judul diatas didasarkan adanya indikasi lemahnya pengawasan akan kebijakan tata ruang di kawasan lindung sehingga berdampak terjadinya kerusakan lingkungan.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Dr. Eng Maryono, ST, MT selaku ketua program Magister Ilmu Lingkungan.
2. Prof. Dr. rer, nat. Imam Buchori, ST selaku dosen pembimbing.
3. Prof. Sudharto P Hadi, MES, PhD selaku ketua penguji.
4. Dr. rer.nat. Thomas Triadi P, ST, M.Eng selaku penguji II.
5. Seluruh staf pengelola Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Pemerintah Kabupaten Kebumen, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Karangsambung dan masyarakat di wilayah penelitian Karangsambung sekitarnya dalam memberikan akses informasi dan data.
7. Keluarga, istri dan anak tercinta dalam memberikan dukungan dan semangat.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, lembaga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih baik serta sebagai masukan di masa yang akan datang.

Semarang, Februari 2020



Indraya Kusyuniadi
30000216410031

DAFTAR ISI



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Riwayat Hidup	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xii
Abstraksi	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	11
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	11
1.4.1 Ruang Lingkup Materi	11
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah	12
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.5.1 Manfaat Teoritis	12
1.5.2 Manfaat Praktis	12
1.6 Penelitian Relevan dan Keterbaruan Penelitian	11
1.7 Kerangka Pikir	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Teori Implementasi Kebijakan	18
2.2 Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Lindung	18
2.3 Rencana Tata Ruang Berbasis Daya Dukung Lingkungan	19
2.4 Kebijakan Penataan Ruang dalam Menjaga Fungsi Lindung	21
2.5 Konsep Geopark Sebagai Perlindungan Terhadap KCAG	23
2.5.1 Kawasan Cagar Alam Geologi	23
2.5.2 Pengembangan Konsep Kawasan Geopark	23
2.5.3 <i>Eco-Geotourism</i> Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	25
2.6 Teori dan Pemahaman Judul Penelitian	25
2.6.1 Efektivitas	25
2.6.1.1 Pengertian Efektivitas	25
2.6.1.2 Pengukuran Efektivitas	26
2.6.2 Pengawasan	26
2.6.2.1 Pengertian Pengawasan	26

2.6.2.2	Tujuan Pengawasan	27
2.6.2.3	Prinsip dan Prosedur Pengawasan	28
2.6.2.4	Jenis Pengawasan	28
2.6.2.5	Teknik pengawasan	29
2.6.3	Kebijakan Penataan Ruang	30
2.6.3.1	Pengertian Kebijakan	30
2.6.3.2	Tujuan dan Sasaran Kebijakan	31
2.6.3.3	Penataan Ruang	31
2.6.3.4	Penyelenggaraan Penataan Ruang	32
2.6.4	Definisi Efektivitas Pengawasan Kebijakan Penataan Ruang	35
2.6.4.1	Kemampuan Sumber Daya Manusia	35
2.6.4.2	Kelembagaan Dan Organisasi Pengawasan	35
2.6.4.3	Keterlibatan masyarakat	36
2.6.4.4	Penegakan hukum	37
2.7	Telaah Pustaka	38
III.	METODE PENELITIAN	39
3.1	Metode dan Jenis Penelitian	39
3.2	Bahan dan Materi Penelitian	40
3.2.1	Pemilihan Variabel	40
3.2.2	Obyek Penelitian	41
3.2.3	Subyek Penelitian	41
3.2.4	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	42
3.3	Jalan penelitian	42
3.3.1	Menentukan Populasi dan Sampel	43
3.3.2	Tahapan Pengumpulan Data	47
3.3.3	Teknik Analisis	49
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Hasil Penelitian	53
4.1.1	Identifikasi Kebijakan RTRW di KCAG Karangsembung	53
4.1.1.1	Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031	53
4.1.1.2	Keputusan Menteri ESDM Nomer 2817 K/40/MEM/2006	57
4.1.1.3	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016	57
4.1.2	Identifikasi Karakteristik Wilayah di KCAG Karangsembung	58
4.1.2.1	Letak KCAG Karangsembung	58
4.1.2.2	Karakteristik Sosial, Demografi di KCAG Karangsembung	60
4.1.2.3	Penggunaan Lahan Eksisting di KCAG Karangsembung	61
4.1.2.4	Geodiversity di KCAG Karangsembung	64
4.1.2.5	Aktivitas Penambangan	67

4.2	Pembahasan	68
4.2.1	Analisis Peran BKPRD Kelambagaan dalam Pengawasan Perda RTRW	68
4.2.2	Analisis Peran LIPI Karangsambung dalam Pengawasan Perda RTRW	80
4.2.3	Analisis Peran Masyarakat (Tokoh Lokal) dalam Pengawasan Perda RTRW	90
4.2.4	Analisis Pelaku Penambang dalam Pengawasan Perda RTRW	99
4.3	Temuan Penelitian	106
4.3.1.	Temuan Penelitian Berdasarkan Variabel	107
4.3.1.1	Kelembagaan BKPRD	107
4.3.1.2	Kelembagaan LIPI Karansambung	107
4.3.1.3	Tokoh Masyarakat	108
4.3.1.4	Pelaku Penambang (Penambangan Tanpa Izin/PETI)	108
4.3.2.	Temuan Penelitian Berdasarkan Sub Variabel	108
4.3.2.1	Sosialisasi Kebijakan RTRW	110
4.3.2.2	Perizinan Penambangan	110
4.3.2.3	Penerapan Insentif dan Disinsentif	110
4.3.2.4	Pembiayaan / Pendanaan	111
4.3.2.5	Kepedulian Lingkungan	111
4.3.2.6	Saran Responden	111
4.4	Rumusan Pengawasan dalam Tahapan Implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di KCAGK	112
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1	Kesimpulan	115
5.2	Saran	116
	RINGKAKASAN	118
	DAFTAR PUSTAKA	120
	LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)	126

DAFTAR TABEL

		Halaman
1	Keterbaruan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu	16
2	Muatan penyelenggaraan penataan ruang menurut PP No 15 Tahun 2010	33
3	Variabel Efektivitas Pengawasan Kebijakan Penataan Ruang	40
4	Klasifikasi Variabel, Indikator dan Subyek Penelitian	41
5	Penentuan Sampel untuk Responden Masyarakat	45
6	Jumlah Penambang Pada Lokasi Pengambilan Sampel	46
7	Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data	47
8	Materi Pertanyaan Kuisisioner Variabel Kelembagaan Berdasarkan Sub Variabel Dan Indikator	48
9	Materi Pertanyaan Kuisisioner Variabel Peran Masyarakat (Tokoh Masyarakat) Berdasarkan Sub Variabel Dan Indikator	48
10	Materi pertanyaan kuisisioner Variabel Pelaku Penambang Berdasarkan Sub Variabel dan Indikator	49
11	Muatan Perda No 23 Tahun 2012 RTRW Kabupaten Kebumen terkait dengan Perlindungan KCAG Karangsembung	54
12	Desa dan Kelurahan Tiap Kecamatan di KCAG Karangsembung	60
13	Jumlah Penduduk Tahun 2014 – 2018	61
14	Jumlah Penduduk Menurut pekerjaan di kawasan perencanaan tahun 2018	61
15	Lokasi Batuan Dilindungi Serta Data Kepemilikannya	64
16	Sebaran Lokasi Penambangan Tidak Resmi di KCAG Karangsembung	68
17	Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) dalam BKPRD	69
18	Karakteristik Responden Lingkup Kelembagaan BKPRD	70
19	Persepsi Responden Kelembagaan BKPRD Terhadap Bentuk Sosialisasi RTRW	70
20	Persepsi Responden di Kelembagaan BKPRD Terhadap Kendala Sosialisasi Perda RTRW	71
21	Persepsi Responden di Kelembagaan BKPRD Terhadap Perizinan Penambangan di KCAGK	71
22	Persepsi Responden di Kelembagaan BKPRD Terhadap Peran dalam Perizinan Penambangan	72
23	Persepsi Responden di Kelembagaan BKPRD Terhadap Pentingnya Penerapan Insentif dan Disinsentif	72
24	Persepsi Responden di Kelembagaan BKPRD Terhadap Penerapan Insentif dan Disinsentif	72
25	Persepsi Responden di Lembaga BKPRD Dalam Peran Pemantauan Lingkungan	73
26	Persepsi Responden di Kelembagaan BKPRD Terhadap Bentuk Keterlibatan Pemantauan Lingkungan	73
27	Persepsi Responden di Kelembagaan BKPRD Terhadap Ketersediaan Staf dalam Pemantauan Lingkungan	74

	Halaman
28 Persepsi Responden di Kelembagaan BKPRD tentang Sumber Pembiayaan untuk Pengawasan Lingkungan	74
29 Persepsi Responden di Kelembagaan BKPRD Terhadap Kecukupan biaya untuk Pengawasan Lingkungan	74
30 Rangkuman Wawancara Saran dari Responden Kelembagaan BKPRD dalam Peningkatan Pengawasan Perda RTRW	75
31 Jabatan dan Jumlah Personil di UPT BIKK Karangsembung LIPI	81
32 Karakteristik Responden Kelembagaan LIPI	81
33 Persepsi Responden kelembagaan LIPI Terhadap Bentuk Sosialisasi RTRW	82
34 Persepsi Responden Kelembagaan LIPI Terhadap Kendala Sosialisasi Perda RTRW	82
35 Persepsi Responden Kelembagaan di LIPI Terhadap Perizinan Penambangan di KCAGK	83
36 Persepsi Responden di Kelembagaan BKPRD Terhadap Peran dalam Perizinan Penambangan	83
37 Persepsi Responden di Kelembagaan LIPI Terhadap Pentingnya Penerapan Insentif dan Disinsentif	83
38 Persepsi Responden di Kelembagaan LIPI Terhadap Penerapan Insentif dan Disinsentif	84
39 Persepsi Responden di Lembaga LIPI Dalam Peran Pemantauan Lingkungan	84
40 Persepsi Responden di Kelembagaan LIPI Terhadap Bentuk Keterlibatan Pemantauan Lingkungan	85
41 Persepsi Responden di Kelembagaan LIPI Terhadap Ketersediaan Staf dalam Pemantauan Lingkungan	85
42 Persepsi Responden di Kelembagaan LIPI tentang Sumber Pembiayaan untuk Pengawasan Lingkungan	85
43 Persepsi Responden di Kelembagaan LIPI Terhadap Kecukupan biaya untuk Pengawasan Lingkungan	86
44 Rangkuman Wawancara Saran Dari Responden Kelembagaan LIPI dalam Peningkatan Pengawasan Perda RTRW	86
45 Karakteristik Responden Tokoh Masyarakat di KCAGK	92
46 Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat terhadap Pemahaman dan Sosialisasi Perda RTRW	92
47 Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat Terhadap Perizinan Tambang di KCAGK	93
48 Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat Terhadap Penerapan Insentif dan Disinsentif di KCAGK	93
49 Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat Terhadap Pemantauan Lingkungan di KCAGK	94
50 Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat Terhadap Kepedulian Lingkungan di KCAGK	95
51 Rangkuman Wawancara Saran Responden (Tokoh Masyarakat dalam Peningkatan Pengawasan Perda RTRW	95
52 Karakteristik Responden Penambang	100
53 Persepsi Responden Penambang Terhadap Pemahaman dan Sosialisasi Kebijakan RTRW	101
54 Persepsi Responden Penambang terhadap Perizinan Penambangan	

	Halaman
di KCAGK	101
55 Persepsi Responden Penambang terhadap Pemahaman Insentif dan Disinsentif	102
56 Persepsi Responden Panambang terhadap Penindakan dan Pemantauan Lingkungan	102
57 Persepsi Responden Panambang Terhadap Kepedulian Lingkungan	103
58 Saran dan Keinginan responden panambang	103
59 Hasil Temuan Penelitian berdasarkan Variabel dan Sub Variabel	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Skema Konflik Ruang dalam Kawasan Lindung dan Kebijakan Tata Ruang	4
2 Skema Pohon Masalah Penelitian	6
3 Aktivitas Tambang Illegal Pada Hilir Dan Hulu S. Luk Ulo	7
4 Skema History Kebijakan di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung	8
5 Skema Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Rumusan Masalah Penelitian	10
6 Kerangka Pikir Penelitian	17
7 Skema Pembangunan Geopark	24
8 Siklus Penyelenggaraan Penataan Ruang Menurut PP RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	34
9 Proses Penelitian Kuantitatif	43
10 Zonasi <i>Area Probability Sampling</i> ” KCAG Karangsambung	45
11 Kerangka Analisis	52
12 Peta Rencana Pola Ruang di KCAG Karangsambung (RTRW Kabupaten Kebumen)	56
13 Peta Sebaran Bentuk Geologi Cagar Alam Geologi Karangsambung	57
14 Peta Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung	59
15 Foto Penggunaan Lahan di KCAGK	62
16 Peta Penggunaan Lahan (Land Use) Cagar Alam Geologi Karangsambung	63
17 Foto Geodiversity Lokasi Dilindungi	65
18 Peta Sebaran Situs Geologi	66
19 Aktifitas Penambangan Ilegal di Sungai Luk Ulo, Kecamatan Karangsambung	67
20 Grafik Hasil Sosialisasi Kebijakan RTRW yang Dilakukan Lembaga BKPRD	76
21 Grafik Hasil Respon Lembaga BKPRD Terhadap Perizinan penambangan di KCAGK	77
22 Grafik Hasil Respon Lembaga BKPRD Terhadap Penerapan Insentif dan Disinsentif di KCAGK	78
23 Grafik Hasil Peran Lembaga BKPRD Terhadap Pemantauan Lingkungan di KCAGK	79
24 Grafik Hasil Alokasi Biaya Pengawasan Lingkungan di Lembaga BKPRD	80
25 Grafik Hasil Sosialisasi Kebijakan RTRW yang Dilakukan Lembaga LIPI	87
26 Grafik Hasil Respon Lembaga LIPI Terhadap Perizinan penambangan di KCAGK	88
27 Grafik Hasil Respon Lembaga LIPI terhadap Penerapan Insentif dan Disinsentif di KCAGK	89
28 Grafik Hasil (BKPRD) Tentang Alokasi Biaya Pengawasan	

	Halaman
Lingkungan	89
29 Grafik Hasil Alokasi Biaya Pengawasan Lingkungan di Lembaga LIPI	90
30 Foto Responden di Lokasi	91
31 Grafik Karakteristik Responden Masyarakat Berdasar Posisi Dalam Lingkungan	91
32 Grafik Hasil Pemahaman dan Sosialisasi Oleh Masyarakat Terhadap Kebijakan RTRW	96
33 Grafik Hasil Pendapat Masyarakat Terhadap Perizinan Penambangan	97
34 Grafik Hasil Pemahaman dan Penerapan Masyarakat Terhadap Intensiv dan Disintensiv	97
35 Grafik Hasil Peran Masyarakat Terhadap Pemantauan Lingkungan di KCAGK	98
36 Grafik Hasil Peran Masyarakat Terhadap Kepedulian Lingkungan di KCAGK	99
37 Grafik Karakteristik Responden Penambang	100
38 Grafik Hasil Pemahaman dan Sosialisasi Kebijakan RTRW Terhadap Responden Penambang	104
39 Grafik Hasil Pendapat Responden Penambangan Terhadap Perizinan Penambangan	104
40 Grafik Hasil Pendapat Responden Penambangan Terhadap Perizinan Penambangan	105
41 Grafik Hasil Penindakan dan Pemantauan Lingkungan Terhadap Penambang	105
42 Grafik Hasil Tingkat Kepedulian Lingkungan Responden Penambang	106
43 Skema Rumusan Pengawasan Perda RTRW dalam Implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di KCAGK	114

ABSTRAK



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020

ABSTRAK

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung (KCAGK) adalah kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil, sehingga mendapat julukan sebagai “*Black Box*” dari proses alam semesta. Kebijakan tata ruang (RTRW) menetapkan KCAGK sebagai kawasan strategis sebagai fungsi daya dukung lahan. Konsekuensinya adalah aktifitas yang dapat mengubah bentukan geologi dilarang. Kegiatan penambangan masih menjadi ancaman hilangnya keanekaragaman bebatuan yang dilindungi. Penelitian ini memfokuskan pada aspek pengawasan yang terindikasi lemah dalam penyelenggaraan pentaan ruang, melalui aspek kelembagaan dan masyarakat. Aspek kelembagaan terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan pemerintah daerah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), sedangkan aspek masyarakat diwakili tokoh lokal dan penambang. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif melalui studi deskriptif, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah studi statistik deskriptif dalam bentuk tabel atau grafik. Dalam melengkapi analisis maka hasil temuan penelitian akan digabung metode kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah belum efektifnya peran kelembagaan dan masyarakat dalam pengawasan Peraturan Daerah (Perda) RTRW di KCAGK, dilihat dari 1) sosialisasi kebijakan, 2) perizinan penambangan, 3) penerapan insentif dan disinsentif, 4) pembiayaan dan 5) kepedulian lingkungan. Perlu suatu perbaikan dalam meningkatkan peran kelembagaan dan masyarakat, diantaranya 1) BKPRD perlu ditinjau ulang keberadaannya, 2) peran masyarakat perlu di berikan secara luas dalam pengawasan lingkungan di KCAGK, 3) sistem pengawasan perlu melakukan inovasi dan terobosan melalui teknologi informasi (IT).

Kata Kunci: *Kebijakan RTRW, Kawasan Cagar Alam Geologi, Efektivitas, Pengawasan, Kelembagaan, Masyarakat.*

ABSTRACT

The Karangsambung Geological Nature Reserve (KCAGK) area is a region that has unique rocks and fossils, so that it has been called "Black Box" of the processes of the universe. The spatial policy (RTRW) establishes KCAGK as a strategic area as a function of land carrying capacity. The consequence is that activities that can change geological formations are prohibited. Mining activities still exist a threat to the loss of protected geodiversity. This research focuses on implementation stage that are indicated to be weak in spatial planning process, through institutional and awareness from the community. The institutional aspect consists of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) and the local government through the Regional Spatial Planning Coordinating Board (BKPRD), while aspects of society are represented by local figures and miners. This research uses quantitative methods through descriptive studies. In completing the analysis the research findings will be combined with qualitative methods through observation and interviews. The results obtained from this research are the ineffectiveness of the role of institutions and awareness from the community in the implementation of spatial planning regulations (RTRW) in KCAGK, based on 1) policy socialization, 2) mining licensing, 3) application of incentives and disincentives, 4) financing and 5) environmental awareness. There needs to be an improvement in increasing the role of institutions and society, including 1) BKPRD needs to be reviewed for its existence, 2) community involvement needs to be given broadly in environmental monitoring at KCAGK, 3) the surveillance system needs to innovate and breakthrough through information technology (IT).

Keywords: *Spatial Planning Policy, Geological Nature Reserve, Effectiveness, Implementation, Institutional, Community.*